

PENGELOLAAN EKOWISATA MANGROVE BERBASIS MASYARAKAT DI DESA SEKOTONG BARAT: STRATEGI PENGEMBANGAN DAN TATA KELOLA BERKELANJUTAN

Sukuryadi^{1*}

¹Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Mataram,
Indonesia, *sukuryadi@ummaat.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Ekosistem mangrove di Desa Sekotong Barat memiliki potensi ekologis, edukatif, dan ekonomi untuk dikembangkan sebagai ekowisata bahari berbasis masyarakat. Namun, pengembangan kawasan masih menghadapi persoalan berupa kerusakan fasilitas, sampah yang belum tertangani, akses yang terbatas, dan belum optimalnya koordinasi antaraktor. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi, permasalahan, dan strategi pengelolaan ekowisata mangrove berbasis masyarakat di Desa Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumen. Data dianalisis melalui reduksi, pengelompokan tema, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan memiliki daya tarik berupa lanskap mangrove, aktivitas edukasi penanaman, jalur penelusuran, jasa perahu, dan keterhubungan dengan destinasi wisata bahari di kawasan Sekotong. Meskipun demikian, potensi tersebut belum didukung oleh pemeliharaan sarana, pengelolaan sampah, kelembagaan, pendanaan, promosi, dan pengendalian daya dukung yang memadai. Strategi pengembangan diarahkan pada zonasi kawasan, penguatan kelembagaan pengelola, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan distribusi manfaat, perbaikan fasilitas ramah lingkungan, diversifikasi usaha lokal, serta pemantauan ekologis secara berkala. Pengelolaan berbasis masyarakat diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan konservasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kata Kunci: Ekowisata bahari; mangrove; partisipasi masyarakat; pengelolaan berkelanjutan; Sekotong Barat

Abstract: The mangrove ecosystem in West Sekotong Village has ecological, educational, and economic potential to be developed as community-based marine ecotourism. Nevertheless, its development is constrained by damaged facilities, inadequate waste management, limited access, and weak coordination among stakeholders. This study aims to analyze the potential, problems, and management strategies of community-based mangrove ecotourism in West Sekotong Village, West Lombok Regency. A descriptive qualitative approach was employed through field observations, interviews, and document analysis. Data were analyzed by reducing and categorizing information, presenting thematic findings, drawing conclusions, and applying source and technique triangulation. The results indicate that the area offers mangrove landscapes, planting education, a tracking route, boat services, and connections to nearby marine tourism destinations. However, these assets have not been supported by adequate facility maintenance, waste management, institutional arrangements, financing, promotion, and carrying-capacity control. Development strategies should prioritize zoning, institutional strengthening, meaningful community participation and benefit-sharing, environmentally friendly facilities, diversification of local enterprises, and periodic

ecological monitoring. Community-based management is expected to balance conservation objectives with the welfare of coastal communities.

Keywords: *Community participation; Mangrove; Marine ecotourism; Sustainable management; West Sekotong*

Article History:

Received: 30-07-2026

Revised : 24-08-2026

Accepted: 28-08-2026

Online : 04-09-2026



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Ekosistem mangrove merupakan bagian penting dari wilayah pesisir karena menyediakan fungsi perlindungan pantai, habitat biota, penyimpanan karbon, sumber penghidupan, dan ruang pendidikan lingkungan. Pemanfaatan kawasan sebagai destinasi ekowisata dapat menjadi instrumen konservasi apabila kegiatan wisata disesuaikan dengan karakter ekologis, daya dukung, dan kepentingan masyarakat lokal. Sebaliknya, pembangunan fasilitas dan peningkatan kunjungan tanpa pengendalian dapat menambah tekanan terhadap habitat dan menurunkan mutu pengalaman wisata.

Pengembangan ekowisata mangrove tidak hanya ditentukan oleh keindahan lanskap, tetapi juga oleh kualitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, pemerataan manfaat ekonomi, kebersihan, keamanan, interpretasi lingkungan, dan pemantauan kondisi ekosistem. Ekowisata berbasis masyarakat memberi ruang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, pelayanan wisata, rehabilitasi, dan pembagian manfaat. Pendekatan ini dapat memperkuat mata pencaharian sekaligus membangun insentif sosial untuk konservasi (Singgalen, 2020; Sukuryadi et al., 2021; Nuraeni & Kusum, 2023).

Kajian mengenai ekowisata mangrove di Indonesia menunjukkan bahwa kesesuaian kawasan dan daya dukung perlu menjadi dasar pengembangan. Penilaian dapat meliputi ketebalan dan kerapatan vegetasi, jumlah jenis, keberadaan biota, kondisi pasang surut, luas ruang pemanfaatan, panjang jalur, lama kunjungan, dan jumlah pengunjung yang dapat ditampung (Masud et al., 2020; Idrus, 2021; Ledheng et al., 2022). Selain pengukuran lapangan, pemantauan perubahan tutupan dan kerapatan vegetasi dapat diperkuat dengan data penginderaan jauh seperti Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI (Singgalen et al., 2021; Sukuryadi et al., 2025).

Desa Sekotong Barat merupakan bagian dari kawasan pesisir Kabupaten Lombok Barat yang memiliki sumber daya mangrove dan keterhubungan dengan destinasi wisata bahari, antara lain Pantai Batu Putih, Gili Tangkong, Gili Nanggu, dan Gili Sudak. Di kawasan Tanjung Kelor, Dusun Gunung Ketapang, telah tersedia jembatan atau jalur penelusuran mangrove dan jasa perahu. Potensi tersebut membuka peluang pengembangan paket wisata terpadu yang memadukan pendidikan konservasi, wisata perahu, kuliner perikanan, dan kunjungan ke pulau-pulau kecil.

Observasi awal dalam naskah penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi kawasan dan kualitas pengelolaannya. Beberapa fasilitas dilaporkan rusak, sampah ditemukan berserakan, akses menuju kawasan belum sepenuhnya nyaman, dan tindakan pemeliharaan dari pengelola maupun pemerintah dinilai belum memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan daya tarik fisik belum diikuti sistem pengelolaan operasional, pembiayaan, pembagian peran, dan pemantauan lingkungan yang kuat.

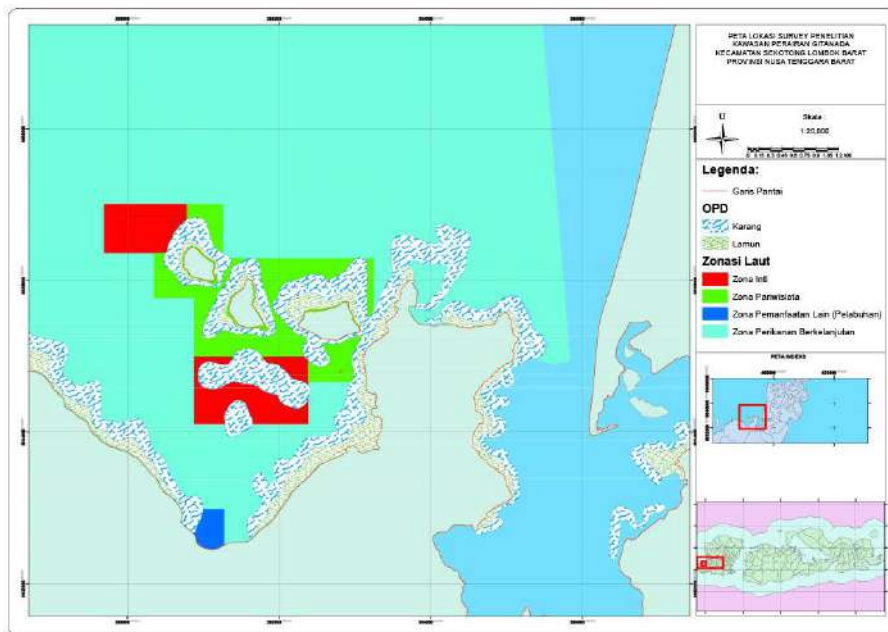
Penelitian terdahulu lebih banyak menilai potensi ekowisata mangrove melalui kesesuaian ekologis dan daya dukung, sementara aspek kelembagaan, kualitas fasilitas, partisipasi masyarakat, distribusi manfaat, serta integrasi dengan jaringan wisata bahari belum selalu dianalisis secara bersamaan. Oleh sebab itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada pengelolaan berbasis masyarakat dengan mengintegrasikan dimensi ekologis, sosial-ekonomi, fasilitas, dan kelembagaan pada konteks Desa Sekotong Barat.

Desa Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat, memiliki peluang pengembangan ekowisata mangrove karena memiliki sumber daya pesisir, aktivitas masyarakat lokal, dan keterhubungan dengan jaringan wisata bahari Sekotong. Kawasan Tanjung Kelor, Dusun Gunung Ketapang, memiliki potensi sebagai destinasi yang menggabungkan konservasi mangrove, edukasi lingkungan, wisata perahu, dan penguatan ekonomi masyarakat. Meskipun memiliki potensi tersebut, pengelolaan kawasan masih menghadapi berbagai persoalan, seperti keterbatasan pemeliharaan fasilitas, permasalahan sampah, belum optimalnya kelembagaan pengelola, serta keterbatasan sistem pemantauan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis potensi, permasalahan, dan strategi pengelolaan ekowisata mangrove berbasis masyarakat di Desa Sekotong Barat melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek ekologis, sosial-ekonomi, fasilitas wisata, dan kelembagaan.

B. METODE PELAKSANAAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kawasan ekowisata mangrove Tanjung Kelor, Dusun Gunung Ketapang, Desa Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini berada pada kawasan permukiman dan tambak serta terhubung dengan jalur wisata bahari Sekotong. Penelitian dilakukan selama dua bulan pada tahun 2023. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei–Juni 2023 untuk menangkap kondisi pengelolaan kawasan pada periode penelitian.



Gambar 1. Lokasi penelitian di Desa Sekotong Barat

2. Pendekatan dan Informan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami potensi kawasan, permasalahan pengelolaan, hubungan antaraktor, dan kebutuhan strategi pengembangan berdasarkan konteks lokal. Teknik yang digunakan dalam penentuan informan adalah dengan teknik non probably sampling yaitu purposive sampling, jumlah anggota populasi dipilih secara sengaja berdasarkan tujuan sebuah penelitian dengan pertimbangan memiliki keterkaitan dan keterlibatan langsung dengan kawasan penelitian (Tarsito, 2014). Responden atau informan masyarakat adalah unsur masyarakat kategori kelompok usia produktif (15-64 tahun) dengan berbagai latar belakang dan profesi baik pedagang, nelayan, wiraswasta, hingga tokoh masyarakat yang menetap dan mengetahui pengembangan kawasan serta memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah pesisir tersebut. Dengan demikian, peneliti dapat berasumsi bahwa kelompok masyarakat tersebut merupakan kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan, kesadaran serta kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Informan dipilih menggunakan teknik non-probability sampling dengan purposive sampling. Informan terdiri atas unsur pemerintah desa, pengelola kawasan/Pokdarwis, masyarakat pesisir, pelaku jasa wisata, dan kelompok usaha lokal. Kecukupan data ditentukan berdasarkan keterulangan informasi (data saturation).

3. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara. Observasi diarahkan pada kondisi vegetasi, kebersihan, jalur penelusuran, toilet, tempat sampah, dermaga, papan informasi, aksesibilitas, aktivitas wisata, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Wawancara digunakan untuk menggali sejarah pengelolaan, pembagian kewenangan, pemeliharaan fasilitas, manfaat ekonomi, partisipasi masyarakat, kendala pengelolaan, dan rencana pengembangan. Data sekunder diperoleh dari dokumen pemerintah, laporan instansi, peta, data statistik, dan

artikel ilmiah yang relevan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dicatat dan ditranskripsi untuk proses analisis. Pertanyaan utama mencakup aspek pengelolaan kawasan, partisipasi masyarakat, kelembagaan, manfaat ekonomi, dan kendala pengembangan.

4. Teknik Analisis dan Keabsahan Data

Data dianalisis melalui proses reduksi, pengodean, pengelompokan tema, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tema analisis mencakup potensi ekologis dan wisata, kondisi fasilitas, partisipasi masyarakat, manfaat ekonomi, kelembagaan, dan keberlanjutan lingkungan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi wawancara, hasil observasi, dan dokumen. Proses pengodean dilakukan secara bertahap melalui open coding, pengelompokan kategori, dan penetapan tema utama. Hasil interpretasi diperiksa melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan pengecekan kembali informasi kepada informan terkait (member checking).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Kawasan dan Keterhubungan Destinasi

Kawasan mangrove Tanjung Kelor berada di Dusun Gunung Ketapang, Desa Sekotong Barat. Lingkungan sekitar terdiri atas permukiman, tambak, dan perairan pesisir. Kawasan memiliki jalur penelusuran yang memungkinkan pengunjung mengamati lanskap mangrove. Jasa perahu di sekitar kawasan dapat digunakan untuk menuju Gili Tangkong, Gili Nanggu, dan Gili Sudak. Kedekatan dengan Pantai Batu Putih dan Pelabuhan Gili Mas memperkuat peluang integrasi kawasan mangrove ke dalam jaringan wisata bahari Sekotong.

Keterhubungan tersebut merupakan kekuatan karena dapat memperpanjang lama tinggal wisatawan dan memperluas manfaat ekonomi bagi penyedia jasa lokal. Namun, integrasi destinasi memerlukan paket wisata yang jelas, informasi rute, standar keselamatan, jadwal perahu, pemandu lokal, dan mekanisme pembagian manfaat. Tanpa pengaturan tersebut, kawasan mangrove berisiko hanya menjadi titik singgah dan tidak memberikan kontribusi ekonomi yang optimal bagi masyarakat.

2. Potensi Ekowisata Mangrove

Tabel 1. Potensi Ekowisata Mangrove

Dimensi	Potensi yang Teridentifikasi	Implikasi Pengembangan
Ekologi	Lanskap mangrove, fungsi perlindungan pantai, habitat biota pesisir.	Konservasi habitat, interpretasi lingkungan, rehabilitasi berbasis tapak.
Edukasi	Kegiatan pengenalan dan penanaman mangrove.	Paket belajar lapangan, papan interpretasi, pemandu terlatih.
Wisata	Jalur penelusuran mangrove, panorama pesisir, wisata perahu.	Paket mangrove-pantai-gili dengan standar pelayanan dan keselamatan.
Ekonomi lokal	Jasa perahu, hasil perikanan, peluang kuliner dan kerajinan.	Penguatan UMKM, pemasaran produk lokal, distribusi manfaat yang transparan.
Akses dan jejaring	Dekat dengan destinasi wisata	Promosi terpadu, informasi rute,

Dimensi	Potensi yang Teridentifikasi	Implikasi Pengembangan
	bahari Sekotong.	kerja sama antar-pengelola destinasi.

Potensi tersebut menunjukkan bahwa kawasan tidak hanya relevan sebagai objek rekreasi, tetapi juga sebagai ruang pendidikan dan ekonomi lokal. Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat menuntut keterlibatan warga sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Temuan ini sejalan dengan Singgalen (2020) dan Nuraeni dan Kusum (2023) serta Sukuryadi et al. (2021), yang menunjukkan bahwa organisasi masyarakat dan aktivitas wisata dapat meningkatkan kesadaran konservasi serta membuka sumber pendapatan baru.

3. Permasalahan Pengelolaan

Hasil observasi dalam naskah awal menunjukkan bahwa kondisi aktual kawasan berbeda dari citra destinasi yang asri dan terpelihara. Permasalahan yang ditemukan meliputi kerusakan fasilitas, toilet yang tidak layak, sampah berserakan, dan indikasi gangguan terhadap biota. Selain itu, pemeliharaan dan respons kelembagaan dinilai belum memadai. Persoalan ini dapat menurunkan kenyamanan, mengurangi kepuasan pengunjung, menambah risiko keselamatan, dan mengganggu fungsi ekologis kawasan.

Tabel 2. Permasalahan pengelolaan

Masalah	Dampak	Akar Masalah yang Perlu Diverifikasi	Kebutuhan Tindakan
Sampah	Penurunan kualitas lingkungan dan pengalaman wisata.	Ketiadaan petugas, sarana, jadwal, atau pembiayaan.	Sistem pemilahan, pengangkutan, edukasi, dan pengawasan.
Fasilitas rusak	Risiko keselamatan dan citra destinasi buruk.	Pemeliharaan tidak rutin dan tanggung jawab tidak jelas.	Audit fasilitas, prioritas perbaikan, SOP pemeliharaan.
Akses terbatas	Mengurangi kenyamanan dan inklusivitas.	Kondisi jalur, dermaga, dan informasi rute.	Perbaikan minimum yang ramah lingkungan dan aman.
Kelembagaan lemah	Program tidak berkelanjutan dan koordinasi rendah.	Struktur, kewenangan, pendanaan, dan kemitraan belum jelas.	Legalitas pengelola, pembagian tugas, rencana kerja dan laporan.
Data ekologis dan wisata minim	Pengembangan tidak berbasis daya dukung.	Pemantauan belum terjadwal.	Inventarisasi vegetasi, data pengunjung, dan monitoring berkala.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur tanpa kelembagaan pemeliharaan tidak cukup untuk menjamin keberlanjutan. Pengembangan harus memperhitungkan kapasitas ekologis dan kapasitas pengelolaan. Masud et al. (2020), Idrus (2021), Ledheng et al. (2022), Sukuryadi et al. (2020) dan Sukuryadi (2025) menegaskan bahwa penilaian kesesuaian dan daya dukung diperlukan untuk menghindari tekanan wisata yang melampaui kemampuan kawasan.

4. Partisipasi Masyarakat dan Kelembagaan

Masyarakat sekitar memiliki posisi strategis sebagai pemilik pengetahuan lokal, pengguna sumber daya, penyedia jasa, dan penerima dampak kegiatan wisata. Keterlibatan masyarakat tidak seharusnya terbatas pada pelaksanaan kegiatan kebersihan atau penanaman, tetapi juga mencakup penyusunan aturan, penetapan tarif, perencanaan produk, pengawasan, dan pembagian pendapatan. Partisipasi yang bermakna akan memperkuat rasa memiliki dan mengurangi ketergantungan pada proyek pemerintah jangka pendek.

Model kelembagaan yang disarankan adalah unit pengelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah desa, kelompok sadar wisata, kelompok nelayan, pelaku jasa perahu, kelompok perempuan atau UMKM, pemuda, dan perwakilan perangkat daerah. Unit tersebut perlu memiliki dasar hukum, struktur tugas, standar operasional, mekanisme keuangan, jadwal pemeliharaan, dan forum evaluasi. Pengalaman pengelolaan berbasis masyarakat menunjukkan bahwa kapasitas organisasi lokal dan distribusi manfaat merupakan faktor penting dalam menghubungkan konservasi dengan penghidupan berkelanjutan (Singgalen, 2020; Sukuryadi et al., 2021; Nuraeni & Kusum, 2023).

5. Strategi Pengembangan

Strategi pengembangan dirumuskan dengan mempertimbangkan potensi kawasan dan permasalahan yang ditemukan. Strategi tidak hanya diarahkan pada peningkatan kunjungan, tetapi juga pada pengendalian pemanfaatan, pemulihan fungsi ekologis, penguatan organisasi lokal, dan pemerataan manfaat ekonomi.

Tabel 3. Strategi pengembangan

Pilar Strategi	Program Utama	Aktor Utama	Indikator Awal
Zonasi dan konservasi	Menetapkan zona inti, rehabilitasi, edukasi, wisata terbatas, pelayanan, dan transportasi perahu.	Pemerintah desa, dinas teknis, masyarakat, perguruan tinggi.	Peta zonasi dan aturan aktivitas tersedia.
Daya dukung	Mengukur vegetasi, panjang jalur, waktu kunjungan, ruang pemanfaatan, dan batas pengujung.	Pengelola, perguruan tinggi, dinas lingkungan/kelautan.	Batas kunjungan harian dan sistem pencatatan.
Kelembagaan	Membentuk atau memperkuat unit pengelola berbasis masyarakat.	Pemerintah desa, Pokdarwis, kelompok masyarakat.	SK pengelola, SOP, rencana kerja, dan laporan keuangan.
Fasilitas dan sampah	Audit dan perbaikan fasilitas prioritas; sistem sampah terpadu.	Pengelola, pemerintah daerah, pelaku usaha.	Fasilitas layak, tempat sampah, jadwal pengangkutan.
Produk wisata dan UMKM	Paket edukasi, pemanduan, wisata perahu, kuliner, dan produk lokal.	Pengelola, kelompok perempuan, nelayan, pemuda.	Jumlah produk, pelaku usaha, dan transaksi lokal.
Pemantauan	Monitoring vegetasi, kualitas lingkungan,	Pengelola, perguruan tinggi, dinas teknis.	Laporan monitoring berkala dan tindak

Pilar Strategi	Program Utama	Aktor Utama	Indikator Awal
	kunjungan, kepuasan, dan pendapatan.		lanjut.

Penetapan zonasi diperlukan agar aktivitas wisata tidak masuk ke seluruh bagian kawasan. Zona inti diarahkan untuk perlindungan, sedangkan kegiatan penanaman dan pendidikan ditempatkan pada zona rehabilitasi atau edukasi. Fasilitas pelayanan sebaiknya ditempatkan pada area yang telah terganggu agar pembangunan tidak membuka habitat baru.

Daya dukung perlu dihitung sebelum promosi intensif dilakukan. Studi di Pulau Pannikiang, Pulau Dodola, dan Desa Dualaus menunjukkan bahwa batas kunjungan dapat ditentukan melalui luas atau panjang area yang dapat dimanfaatkan, kebutuhan ruang pengunjung, waktu operasional, dan rata-rata lama kegiatan (Masud et al., 2020; Idrus, 2021; Ledheng et al., 2022). Pada Sekotong Barat, penghitungan tersebut perlu didukung data panjang jalur, luas zona wisata, waktu buka, dan pola kunjungan.

Pemantauan vegetasi dapat dilakukan melalui pengukuran lapangan dan analisis citra secara periodik. NDVI dapat membantu mengidentifikasi perubahan kerapatan dan menentukan lokasi prioritas rehabilitasi, tetapi hasilnya tetap perlu diverifikasi di lapangan (Singgalen et al., 2021; Sukuryadi et al., 2025). Pemantauan harus diikuti tindakan korektif, bukan hanya menghasilkan laporan.

6. Model Pengelolaan Kolaboratif

Model pengelolaan yang diusulkan dalam pengembangan ekowisata mangrove Desa Sekotong Barat menempatkan prinsip *collaborative governance* sebagai pendekatan utama dalam mengintegrasikan kepentingan konservasi, ekonomi lokal, dan keberlanjutan sosial. Pemerintah desa berperan sebagai koordinator kebijakan lokal yang bertugas membangun arah pengelolaan kawasan, memfasilitasi penyusunan aturan pemanfaatan, serta memastikan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Sementara itu, unit pengelola masyarakat berfungsi sebagai aktor utama dalam pelaksanaan operasional kawasan, mulai dari pelayanan wisata, pemeliharaan fasilitas, pengelolaan kebersihan, hingga pelaksanaan kegiatan edukasi lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *community-based tourism*, dimana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi pengelola sumber daya yang memiliki tanggung jawab terhadap keberlanjutan ekosistem. Studi Nuraeni dan Kusum (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat melalui model wisata berbasis komunitas mampu memperkuat fungsi konservasi mangrove sekaligus menciptakan peluang ekonomi lokal.

Dalam implementasinya, pemerintah kabupaten memiliki peran strategis sebagai pembina teknis dan penyedia dukungan lintas sektor, terutama dalam aspek perencanaan wilayah, konservasi lingkungan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan regulasi yang mendukung keberlanjutan kawasan. Perguruan tinggi dapat berperan sebagai mitra pengetahuan melalui kegiatan penelitian, pemantauan ekologis, pendampingan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan wisata berkelanjutan. Selain itu,

keterlibatan pelaku usaha perlu diarahkan sebagai mitra strategis dalam pemasaran, pengembangan produk wisata, dan penyediaan dukungan pembiayaan, namun tetap berada dalam kerangka aturan konservasi agar aktivitas ekonomi tidak menyebabkan degradasi lingkungan. Konsep tersebut sesuai dengan penelitian Alfiandri et al. (2024) dan Sukuryadi (2025) yang menjelaskan bahwa pengelolaan ekowisata mangrove berkelanjutan membutuhkan sinkronisasi peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta melalui mekanisme kolaborasi yang memiliki tujuan bersama, pembagian peran yang jelas, serta proses koordinasi yang berkelanjutan.

Selain aspek kelembagaan, keberhasilan model pengelolaan kolaboratif juga ditentukan oleh keterlibatan wisatawan sebagai bagian dari sistem konservasi. Wisatawan tidak hanya diposisikan sebagai pengguna jasa wisata, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab melalui kepatuhan terhadap zonasi kawasan, pembayaran layanan lingkungan, pengurangan sampah, serta partisipasi dalam aktivitas edukasi konservasi. Dengan demikian, hubungan antara masyarakat, pemerintah, sektor usaha, perguruan tinggi, dan wisatawan membentuk suatu sistem pengelolaan yang saling mendukung dalam menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan perlindungan ekosistem mangrove. Pendekatan berbasis kolaborasi ini penting karena pengembangan ekowisata sering menghadapi tantangan berupa peningkatan tekanan wisata, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan konflik kepentingan antaraktor. Oleh karena itu, tata kelola yang adaptif dan partisipatif menjadi kunci agar kawasan mangrove dapat berkembang sebagai destinasi wisata berkelanjutan tanpa mengurangi fungsi ekologisnya (Utamy et al., 2023; Sukuryadi, 2025; Saputra et al., 2025).

Sumber pendapatan dalam pengelolaan ekowisata mangrove dapat dikembangkan melalui berbagai skema pembiayaan berbasis jasa lingkungan, seperti tiket masuk kawasan, jasa pemandu wisata, paket edukasi penanaman mangrove, layanan wisata perahu, penyewaan fasilitas, serta penjualan produk UMKM masyarakat lokal. Diversifikasi sumber pendapatan tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber pembiayaan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi lembaga pengelola kawasan. Dalam konteks ekowisata berbasis masyarakat, pendapatan wisata tidak hanya dipandang sebagai keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendukung konservasi melalui pembiayaan operasional, pemeliharaan fasilitas, rehabilitasi ekosistem, pengelolaan sampah, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Penelitian mengenai pengembangan ekowisata mangrove menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme ekonomi yang jelas dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk terlibat dalam konservasi karena manfaat langsung dari keberadaan kawasan dapat dirasakan oleh kelompok lokal (Nurhayati et al., 2023; Saefullah et al., 2023). Selain itu, studi mengenai kesediaan membayar (*willingness to pay*) wisatawan menunjukkan bahwa sebagian pengunjung memiliki kecenderungan mendukung biaya konservasi apabila terdapat transparansi mengenai penggunaan dana dan manfaat lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan wisata (Musliha et al., 2023; Sukuryadi, 2026).

Pengelolaan pendapatan ekowisata perlu dilakukan melalui sistem yang transparan, akuntabel, dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah konflik distribusi manfaat serta memastikan keberlanjutan kelembagaan pengelola. Alokasi pendapatan sebaiknya tidak hanya digunakan untuk kebutuhan operasional harian, tetapi juga diarahkan untuk kegiatan konservasi jangka panjang, seperti rehabilitasi mangrove, monitoring kondisi ekosistem, peningkatan kapasitas masyarakat, serta penyediaan insentif bagi kelompok yang terlibat dalam pengelolaan kawasan. Transparansi keuangan menjadi faktor penting karena dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan dan meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap kawasan wisata. Kajian mengenai ekowisata mangrove berbasis masyarakat menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan kelembagaan lokal dalam mengatur pembagian manfaat ekonomi, membangun partisipasi masyarakat, dan memastikan bahwa aktivitas wisata tetap berada dalam batas keberlanjutan ekologis (Nuraeni & Kusum, 2023; Azzahra et al., 2023). Dengan demikian, model pembiayaan ekowisata mangrove di Desa Sekotong Barat perlu dirancang sebagai mekanisme ekonomi konservasi yang tidak hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga memperkuat perlindungan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kawasan ekowisata mangrove Tanjung Kelor, Desa Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata bahari berbasis masyarakat. Potensi tersebut tidak hanya berasal dari keberadaan ekosistem mangrove sebagai sumber daya ekologis, tetapi juga didukung oleh nilai edukasi, aktivitas wisata, keterhubungan dengan jaringan destinasi bahari Sekotong, serta peluang pengembangan ekonomi lokal melalui jasa perahu, produk perikanan, dan usaha masyarakat pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kawasan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan sampah, aksesibilitas, kelembagaan pengelola, serta belum optimalnya sistem pemantauan kondisi ekologis dan aktivitas wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan potensi alam belum sepenuhnya didukung oleh tata kelola kawasan yang mampu menjamin keberlanjutan pemanfaatannya.

Pengelolaan ekowisata mangrove berbasis masyarakat memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas ekologis, partisipasi masyarakat, dan mekanisme distribusi manfaat ekonomi yang adil. Masyarakat lokal perlu ditempatkan sebagai aktor utama dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan, serta pengembangan produk wisata sehingga tercipta rasa memiliki terhadap kawasan konservasi. Strategi pengembangan ekowisata mangrove di Desa Sekotong Barat diarahkan melalui penguatan kelembagaan pengelola, penyusunan zonasi kawasan, pengendalian daya dukung wisata, peningkatan

kualitas fasilitas ramah lingkungan, pengelolaan sampah terpadu, pengembangan usaha lokal, serta pelaksanaan monitoring ekologis dan sosial-ekonomi secara berkala. Dengan pendekatan tersebut, kawasan mangrove dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata yang mampu menjaga keseimbangan antara konservasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan ekowisata mangrove di Desa Sekotong Barat perlu diarahkan pada penguatan tata kelola berbasis masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, pengelola wisata, masyarakat lokal, perguruan tinggi, dan pelaku usaha. Pemerintah dan pengelola kawasan disarankan untuk memperkuat kelembagaan pengelola, menyusun aturan pemanfaatan kawasan berbasis zonasi, serta melakukan pengendalian daya dukung wisata agar aktivitas kunjungan tetap sesuai dengan kapasitas ekologis mangrove. Selain itu, peningkatan kualitas fasilitas wisata, pengelolaan sampah terpadu, penyediaan informasi lingkungan, dan pemeliharaan sarana pendukung perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan. Masyarakat lokal perlu terus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pengelolaan, pengawasan kawasan, serta pengembangan usaha wisata dan produk lokal agar manfaat ekonomi dapat terdistribusi secara merata. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk melakukan pengukuran yang lebih mendalam terkait kondisi ekologis mangrove, daya dukung kawasan, persepsi wisatawan, dampak ekonomi terhadap masyarakat, serta efektivitas kelembagaan pengelola sebagai dasar pengembangan ekowisata mangrove yang berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada periode pengumpulan data yang relatif terbatas, jumlah informan yang disesuaikan dengan konteks lapangan, serta belum melakukan pengukuran kuantitatif terkait daya dukung ekologis, jumlah kunjungan wisatawan, dan pendapatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk memperkuat basis data pengembangan ekowisata mangrove.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada masyarakat Desa Sekotong Barat, khususnya masyarakat di sekitar kawasan mangrove Tanjung Kelor, yang telah memberikan informasi, pengalaman, dan dukungan selama proses pengumpulan data penelitian. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Sekotong Barat, pengelola kawasan ekowisata, serta seluruh pihak terkait yang telah membantu memberikan informasi mengenai kondisi kawasan, pengelolaan wisata, dan upaya pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Terima kasih juga disampaikan kepada Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengelolaan ekowisata mangrove yang berkelanjutan serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfiandri, A., Prasojo, E., & Malik, J. A. (2024). *Fostering sustainable mangrove ecotourism: A collaborative governance approach on Bintan Island, Indonesia*. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 15(3). <https://doi.org/10.18196/jsp.v15i3.334>
- Azzahra, P. R., Sumarga, E., & Sholihah, A. (2023). Mangrove ecotourism development at Karimunjawa National Park, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 24, 4457–4468. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d240827>
- Nurjan, F., Nurhayati, & Sukuryadi. (2026). Strategi Pengembangan Agrowisata Berkelanjutan di Kawasan Waduk Batujai, Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 7(3), 3321–3326. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i3.2047>
- Idrus, S. (2021). Environmental quality and carrying capacity analysis of the mangrove ecotourism at Dodola Island, Morotai Island District. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 11(1).
- Ledheng, L., Dewi, N. P. Y. A., & Hale, M. (2022). Analysis of the suitability and carrying capacity of mangrove ecotourism Dualaus Village, Belu Regency, East Nusa Tenggara Province. *Media Konservasi*, 27(3), 91–100. <https://doi.org/10.29244/medkon.27.3.91-100>
- Masud, R. M., Yulianda, F., & Yulianto, G. (2020). Suitability and carrying capacity of the mangrove ecosystem for ecotourism development at Pannikiang Island, Barru Regency, South Sulawesi. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, 12(3), 673–686. <https://doi.org/10.29244/jitkt.v12i3.32847>
- Musliha, C., Waridin, W., Prastyadewi, M. I., Wardhani, A. A., & Pratama, I. (2023). Challenges and strategies: Willingness to pay for mangrove forest ecotourism development in Indonesia. *E-Journal of Tourism*, 10(2), 190–206. <https://doi.org/10.24922/eot.v10i2.101646>
- Nuraeni, E., & Kusum, Y. W. C. (2023). The role of community-based tourism for mangroves conservation in Banten, Indonesia. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 13(4), 606–612. <https://doi.org/10.29244/jpsl.13.4.606-612>
- Nurhayati, A., Akbarsyah, N., Pamungkas, W., Herawati, T., & Yustiati, A. (2023). Strengthening local community in mangrove ecotourism at Pangandaran, West Java Province, Indonesia. *Asian Journal of Fisheries and Aquatic Research*, 21(3), 44–52. <https://doi.org/10.9734/ajfar/2023/v21i3543>
- Saefullah, E., Hidayat, S., Fatari, F., Fatoni, M., & Rohaeni, N. (2023). The socio-economic benefits of community-based mangrove ecotourism in Lontar Village, Serang Regency. *Jurnal Kawistara*, 13(2).
- Saputra, A., Masrizal, M., Marefanda, N., Herizal, H., & Harakan, A. (2025). From local wisdom to community-based governance: Managing mangrove ecotourism in Aceh, Indonesia. *Simulacra*, 9(1).
- Setyahandani, N. E., Yulianda, F., & Yulianto, G. (2021). Resources potential and marine tourism carrying capacity of Tunda Island, Serang, Banten. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, 13(1), 71–80. <https://doi.org/10.29244/jitkt.v13i1.34699>
- Singgale, Y. A. (2020). Mangrove forest utilization for sustainable livelihood through community-based ecotourism in Kao Village of North Halmahera District. *Jurnal*

- Manajemen Hutan Tropika, 26(2), 155–168.
<https://doi.org/10.7226/jtfm.26.2.155>
- Singgalen, Y. A., Gudiato, C., Prasetyo, S. Y. J., & Fibriani, C. (2021). Mangrove monitoring using normalized difference vegetation index (NDVI): Case study in North Halmahera, Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, 13(2), 219–239.
<https://doi.org/10.29244/jitkt.v13i2.34771>
- Sukuryadi, Harahab, N., Primyastanto, M., & Semedi, B. (2020). Analysis of suitability and carrying capacity of mangrove ecosystem for ecotourism in Lembar Village, West Lombok District, Indonesia. *Biodiversitas*, 21(2), 596-604.
- Sukuryadi, S. (2021). Institutional Capacity in the Mangrove Ecotourism Development of Lembar Area, West Lombok, Indonesia. *ECSOFiM: Journal of Economic and Social of Fisheries and Marine*, 8(2), 151-165.
- Sukuryadi, Harahab, N., Primyastanto, M., & Semedi, B. (2021). Collaborative-based mangrove ecosystem management model for the development of marine ecotourism in Lembar Bay, Lombok, Indonesia: Sukuryadi et al. *Environment, Development and Sustainability*, 23(5), 6838-6868.
<https://doi.org/10.1007/s10668-020-00895-8>
- Sukuryadi, S., Johari, H. I., & Wijaya, A. (2024). Strategi Restorasi Ekosistem Mangrove di Kawasan Desa Lembar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(6), 1455-1465.
- Sukuryadi, Johari, H. I., Ibrahim, Adiansyah, J. S., & Nurhayati. (2025, January). Assessing mangrove forest changes using vegetation index algorithm in southern west Lombok. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1441, No. 1, p. 012002). IOP Publishing.
- Sukuryadi, S. (2025). Analysis of Suitability and Carrying Capacity for Marine Ecotourism on Small Islands in West Lombok. *ECSOFiM (Economic and Social of Fisheries and Marine Journal)*, 13(1), 94-108.
<https://doi.org/10.21776/ub.ecsofim.2025.013.01.08>.
- Sukuryadi. (2025). Sustainability Analysis of Marine Ecotourism Based on Small Island Resources in GITANADA Island Sea, West Lombok Regency, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Perikanan Dan Kelautan*, 18(1), 186–205.
<https://doi.org/10.20473/jipk.v18i1.76955>
- Sukuryadi. (2026). Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Gili Nanggu Dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan. *GEOGRAPHY : Jurnal Kajian Penelitian & Pengembangan Pendidikan*, 14(1), 257-269.
<https://doi.org/10.31764/geography.v14i1.39017>
- Tarsito, S. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Utamy, W. A., Susanti, E., & Runiawati, N. (2023). Good tourism governance dalam pengelolaan ekowisata mangrove Kampung Teluk Semanting Kabupaten Berau. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(2).
- Widiatmaka, Syaifuddin, Z., & Panuju, D. R. (2023). Suitability of mangrove tourism in the Kacepi Mangrove Ecotourism Park, Kacepi Village. *Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan*, 25(2), 71–77. <https://doi.org/10.29244/jitl.25.2.71-77>